

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Visi Kota Yogyakarta adalah mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan. Salah satu visi pembangunan Kota Yogyakarta, dengan mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara, hal itu tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2016.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta membuka peluang investasi di sektor pariwisata yaitu perhotelan, akan tetapi antusias para investor tak terkendali sehingga pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta begitu massif. Pelaku usaha yang mempunyai modal lebih mampu memainkan perannya sebagai investor untuk melakukan perluasan usahanya. Kota Yogyakarta adalah salah satu wilayah yang paling menjanjikan dan menguntungkan bagi para pelaku usaha, sebab destinasi pariwisata sangat kompleks dan menarik bagi para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sehingga apapun itu, bagaimanapun caranya Yogyakarta harus bisa dikuasai (dalam arti khusus pangsa pasarnya) bagi para pelaku usaha. Minimal satu kegiatan usaha harus di dirikan di Kota Pariwisata ini.

Masyarakat Kota Yogyakarta secara umum bukanlah pelaku usaha, sebab apabila dikaji secara menyeluruh dengan pendataan yang ada ternyata tidak semuanya bergerak di bidang jasa. Salah satu contohnya adalah Pasar tradisional Beringharjo pedagangnya sekitar lima puluh persen warganya adalah masyarakat jogja, separuhnya campuran dari kabupaten lain dan luar daerah. Sehingga kebijakan yang akan di keluarkan harus sangat hati-hati dan adil bagi Pemerintah Kota.

Investasi merupakan langkah yang di buka menghadapi realisasi globalisasi dengan persyaratan khusus yang akan membawa dampak bagi kemajuan warga kota Yogyakarta. Kota harus di bangun dengan dasar keadilan bagi warganya. Pemerataan pembangunan harus dirasakan merata dan menyeruluh oleh warganya. Keadilan, pemerataan pembangunan dan transparansi ekonomi selalu di jadikan visi dan misi oleh Pemerintah Kota.

Mengenai Good Governance dalam pembangunan hotel di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan pondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui keterbukaan, maka masyarakat bisa tahu apa yang

direncanakan dan yang sedang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan transparansi, masyarakat bias memenuhi hak konstitusionalnya berpartisipasi dalam mengontrol tugas dan fungsi pemerintahan. Keterbukaan ini juga dapat dijadikan sarana pencegahan penyalahgunaan jabatan baik terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari ketersediaan sarana dan prasana Pemerintah Kota, khususnya dinas perizinan dalam rangka pelayanan perizinan secara online maupun non-online maka keterbukaan secara formil legalistik sudah dilakukan dengan baik. Namun secara materiil, keterbukaan masih belum menjawab fungsi perizinan itu sendiri. Khususnya terkait dengan perlindungan kepentingan umum dan pengendalian dampak lingkungannya. Karena itu, proses keterbukaan perlu didorong sampai pada dasar pertimbangan dan keputusannya. Lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar izin juga belum dirasa efek jeranya. Pemerintah Kota Yogyakarta masih lebih mempertimbangkan aspek ekonomi pertumbuhan hotel untuk meningkatkan pendapatan PAD dan berbagai kepentingan yg bersifat politis, ketimbang moral melalui ketaatan asas para pemohon izin.

Harus ada ikatan yang kuat antara pemerintah kota dengan masyarakat Kota Yogyakarta untuk pembangunan Kota Yogyakarta. Jargon “Segoro Amarto” harus selalu di tingkatkan. Pengkajian pembangunan harus memperhatikan pembangunan masyarakat dan lingkungan sekitar, tidak boleh terpaku pada nilai investasi yang tinggi saja dan intervensi dari luar. Berbagai prestasi dan kinerja yang baik harus terus di tingkatkan : Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Pemerintah Daerah terbaik ke 10 diberikan pada tanggal 18 desember 2017, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2017 dengan predikat nilai “**BB**” sangat baik, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik tanggal 21 November 2016. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Walikota Yogyakarta sebagai Pembina Pelayanan Publik kategori sangat baik tgl 24 januari 2018.